

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI
TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III
SAWAHLUNTO

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

FEBRIAN HIDAYAT
181000474201042

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022

No.Register : 469/FHUK-UMMY/VIII-2022

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto

Nama : Febrian Hidayat (181000474201042) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Mahammad Yamin Solok. Pembimbing I Ibu Rifqi Devi Lawra S.H., M.H. Pembimbing II Ibu Adriyanti S.H., M.H

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia ke-4 “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, Serta Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 4b “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pengertian Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : bagaimana Implementasi, Kendala, dan Apasaja Upaya dalam mengatasi kendala terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang di teliti, data sekunder di peroleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika kelas III Sawahlunto belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Solusi dari Lapas Agar pelaksanaan rehabilitasi berjalan dengan baik memberikan pembekalan kepada petugas agar SDM bisa memahami konsep rehabilitasi dan memanfaatkan ruang yang ada walau belum sesuai dengan standar rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Josias Simon R, Thomas Sunaryo. 2020. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ashshofa Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* .Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Hukum Pidana*. Tangerang Universitas Terbuka.
- Makaro, Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, 2020. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish (CV BUDI UTAMA).
- Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish (CV BUDI UTAMA).
- WP, Ratna. 2020. *Aspek Pidana Penyalahgunaan narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, Tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.
- Permenkumham No : 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Permenkumham No : 6 Tahun 2013 Tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkoba Dengan.

C. Jurnal

Felicia Evelyn. 2015. "Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta" *Jurnal Ilmiah*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Firdaus Insan. 2020. "Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba di Unit Pelayanan Teknis Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020: 469-492*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Hafied Ali Gani. 2015. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba" *Jurnal Ilmiah*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Hidayatun Siti, Yeni Widowaty. 2020. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan" *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2, September 2020*. Yogyakarta : Kampus Terpadu UMY.

Lysa Angrayni, Yusliati. 2018. "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Batam)" *Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018 : 78 – 96*. Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Yuliana Yuli W, Atik Winanti. 2019. "upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam Perspektif hukum pidana". *Jurnal Hukum Vol.10 No.1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/> Data Update 24/11/2021 pada pukul 23:00:27 WIB Sumber Data Kejahatan Narkoba SDP di akses Kamis 25/11/2021 pukul 16:27 WIB

<https://bnn.go.id/standar-nasional-indonesia-tentang-layanan-rehabilitasi-bagi-pecandu> di akses Rabu 12/07/2022 pukul 17:43 WIB